

BAB III

UPAYA NEGOSIASI SERTA PERTENTANGAN KEPENTINGAN

ANTARA KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN

Stabilitas keamanan sebuah kawasan tergantung pada stabilitas politik di negara negara yang ada di kawasan tersebut. Stabilitas keamanan sebuah negara akan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara atau negara lainnya. Artinya pertahanan keamanan sebuah Negara yang stabil akan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian dan perpolitikan Negara tersebut, dan juga akan mempengaruhi stabilitas perekonomian dan perpolitikan negara lain yang masih dalam satu kawasan.

Korea Utara sebagai negara yang sejak lama kontra akan kehadiran Korea Selatan di Semenanjung Korea juga menjadi tantangan tersendiri bagi Korea Selatan. Dengan sistem pemerintahan yang diktator komunis tersebut sangat jauh berbeda dengan sistem Korea Selatan yang sangat demokratis. Korea Utara memiliki ancaman yang cukup tinggi dan apabila ancaman tersebut benar benar terwujud maka akan sangat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan, terutama ancaman akan persenjataan nuklir yang dimilikinya. Ancaman ini bukan hanya menyebabkan kekhawatiran di negara negara sekitar saja, akan tetapi juga cukup menciptakan kekhawatiran semua pihak yang memiliki kepentingan di Semenanjung Korea. Usaha Korea Selatan untuk membina hubungan dengan Korea Utara selalu dijalankan dengan penuh pertimbangan, apalagi setelah Korea Selatan di bawah pemerintahan sipil yang demokratis.

Dikarenakan konflik yang sudah berkepanjangan dan seperti tidak ada ujungnya, berbagai pihak bertanya-tanya apakah segala upaya telah ditempuh demi menyelesaikan konflik Korea. Bahkan banyak kalangan meragukan keseriusan Korea Utara dan Korea Selatan untuk benar-benar menyelesaikan berbagai kasus yang melibatkan kedua Negara. Namun, sesungguhnya telah terdapat berbagai upaya negosiasi yang dilakukan kedua pihak, walaupun belum maksimal. Hal ini dikarenakan terlalu banyaknya pertentangan kepentingan diantara Korea Utara dan Korea Selatan. Kedua Negara sama-sama gigih dan tidak mau mengalah. Keduanya lebih memilih duduk berhadapan untuk memenangkan kepentingan negaranya, dibandingkan duduk sejajar dengan pihak lawan untuk bersama-sama menemukan solusi masalah yang ada. Dalam hal ini, Korea Utara dan Korea Selatan lebih sering menerapkan strategi bargaining.

A. Negosiasi antara Korea Utara dan Korea Selatan

Konflik yang terjadi antara dua Negara bersaudara, Korea Utara dan Korea Selatan memang cukup pelik. Hal ini tidak terlepas dari kondisi internal baik di Korea Utara maupun Korea Selatan. Pada tahun 2008, Korea Selatan berganti kepemimpinan ke tangan Lee Myun Bak yang selanjutnya menerapkan kebijakan cukup keras terhadap Korea Utara dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Sedangkan Korea Utara sendiri memperlihatkan respon yang tidak kalah keras terhadap Korea Selatan. Keadaan seperti itu terus berlangsung hingga masa kepemimpinan Lee Myun Bak habis pada akhir 2012 yang ternyata tidak terpilih kembali untuk memimpin Korea Selatan pada periode selanjutnya. Berbagai

upaya negosiasi telah dilakukan oleh banyak pihak. Namun, belum ada pertemuan ataupun keputusan yang benar benar membuat Korea Utara dan Korea Selatan terbebas dari perang. Bahkan sebenarnya jarang sekali terdapat pertemuan langsung tingkat tinggi antara Presiden Korea Utara dan Presiden Korea Selatan. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak sama sama bersikukuh untuk tidak bersedia bertemu sebelum salah satu pihak mau menyetujui kemauan pihak lawan.

Pada tanggal 22 Agustus 2009, Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak bertemu dengan pejabat senior Korea Utara secara resmi untuk pertama kalinya, sebelum upacara pemakaman mantan Presiden Kim Dae-jung. Utusan berjumlah enam orang tersebut membawa pesan dari Presiden Korea Utara, Kim Jong-il, yang intinya menyampaikan harapan agar hubungan dua negara membaik. Pertemuan tersebut dilihat sebagai upaya pencairan ketegangan yang signifikan, karena Presiden Lee sebelumnya pernah disebut sebagai penghianat oleh pihak Korea Utara.⁶⁸ Harapan yang disampaikan oleh pihak Korea Utara tersebut diidentifikasi sebagai taktik *Inaction* karena hanya sekedar menyampaikan harapan tanpa ada langkah langkah kongkrit.

Beberapa negosiasi yang telah dilakukan mungkin tidak langsung menilik ke arah persoalan utama kedua belah pihak, akan tetapi segala bentuk pertemuan diantara Korea Selatan dan Korea Utara sangat penting karena dengan adanya hal

⁶⁸ "Presiden Korsel temui utusan Korut", http://www.bbc.co.uk/indonesian/news/story/2009/08/090823_koreaenvoy.shtml, diakses tanggal 20 november 2012.

tersebut maka terlihat bahwa masih terdapat iktikad baik untuk menjalin hubungan. Sepeerti halnya yang terjadi pada bulan oktober 2009. Pada bulan tersebut, kedua belah pihak mengadakan pertemuan untuk membahas pencegahan banjir sungai Imjin. Dalam pertemuan tersebut, Korea Utara menyampaikan penyesalannya atas kasus kebanjiran yang menyebabkan kematian 6 warga Korea Selatan pada 6 September 2009. Kejadian tersebut bermula saat Korea Utara membuang air bedungan di hulu sungai Imjin tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selama pertemuan, delegasi Korea Utara menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain kecuali membuang air untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Menanggapi permintaan maaf tersebut, pihak Korea Selatan dengan lapang dada menerimanya sebagai iktikad baik untuk menjalin hubungan diantara kedua Korea. Merupakan suatu hal yang luar biasa ketika Korea Utara menyetujui usulan Korea Selatan untuk mengadakan pertemuan, hanya satu hari setelah pihak Korea Selatan menyampaikannya. Hal tersebut juga mencerminkan sikap aktif Korea Utara untuk melakukan dialog dengan Korea Selatan.⁶⁹ Dalam kasus sungai Imjin, kedua Korea berhasil menekan ego masing masing, setidaknya untuk tidak saling menyalahkan.

Selanjutnya, niat melakukan negosiasi bukan hanya terus menerus datang dari pihak Korea Selatan, akan tetapi juga dari pihak Korea Utara. Dalam beberapa kesempatan, Korea Utara mulai membuka diri dengan menawarkan melakukan

⁶⁹ "Hasil pertemuan tingkat kerja antarKorea belakangan ini dan prospeknya", http://world.kbs.co.kr/indonesian/program/program_koreatoday_detail.htm?No=555, diakses tanggal 8 november 2012

dialog damai. Pada tanggal 1 Januari 2011, Korea Utara mengungkapkan pihaknya bersedia untuk segera merundingkan jalan keluar atas konfrontasi antara keduanya. Selain itu, Korea Utara juga mengirimkan tiga pesan telepon ke Korea Selatan pada tanggal 10 Januari 2011 untuk mengajukan pembicaraan antar-Korea. Atas nama Komite Korea Utara untuk Perdamaian Asia Pasifik, pesan pertama menyarankan bahwa kedua belah pihak mengadakan pembicaraan tingkat kerja pada tanggal 27 Januari 2011 di Gaeseong untuk mempersiapkan guna melakukan pembicaraan pemerintah tingkat yang lebih tinggi. Pesan kedua di bawah nama Palang Merah 2011, Korea Utara mengusulkan mengadakan pembicaraan Palang Merah pada tanggal 1 Februari di Munsan, sebuah kota Korea Selatan dekat perbatasan antar-Korea. Terakhir, direktur Korea Utara di kantor kerjasama ekonomi antar-Korea menginformasikan bahwa Korea Utara akan membuka kembali kantor di Gaeseong itu pada 12 Januari 2011.⁷⁰

Mengenai hal diatas, terdapat beberapa keraguan terhadap tujuan sesungguhnya dari pihak Korea Utara yang berinisiatif mengadakan dialog damai. Hal ini tidak terlepas dari citra Korea Utara yang selama ini dipandang sulit diajak bekerjasama apalagi mengusulkan pertemuan secara mandiri. Ada beberapa kalangan yang menganggap langkah tersebut terpaksa dilakukan untuk mengatasi krisis pangan yang begitu parah di Korea Utara. Korea Utara berusaha menarik simpati tetangganya, Korea Selatan, untuk mendapatkan bantuan pangan. Masih

⁷⁰ "Tanda-tanda untuk dialog antar-Korea yang semakin tumbuh", http://world.kbs.co.kr/indonesian/program/program_koreatoday_detail.htm?No=1009, diakses tanggal 8 november 2012

di bulan yang sama, pihak Korea Utara mendesak Korea Selatan untuk mau menerima permintaan dialog ulang mengenai masalah yang terjadi diantara keduanya. Pihak Korea Utara menyebut usulan tersebut sebagai “kesempatan penting” untuk meningkatkan hubungan diantara keduanya. Kerenggangan hubungan diantara kedua Negara mencapai tahap yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sejak tahun 2008 sampai 2011 membuktikan bahwa konfrontasi tidak menyelesaikan masalah tetapi justru memicu konflik militer dan perang. Pihak Korea Utara meminta kedua pihak untuk menghentikan aksi saling menantang yang akan memperparah situasi. Akan tetapi, usulan tersebut tidak direspon oleh pihak Korea Selatan.⁷¹ Dalam proses negosiasi tersebut, Korea Utara mencoba menerapkan strategi *concession making*, sedangkan Korea Selatan menggunakan taktik *Inaction*.

Pada bulan February, tepatnya pada tanggal 8 februari 2011, Korea Utara dan Korea Selatan akhirnya menggelar pertemuan yang diwakili oleh pihak militer masing masing Negara. Pertemuan tersebut membicarakan isu kemanusiaan serta perselisihan mengenai insiden kapal cheonan dan pulau yeonpyon. Korea Selatan secara prinsip menyetujui usulan Korea Utara untuk mengadakan reuni keluarga yang terpisah sejak perang Korea berakhir tahun 1953, dan memulai kerja sama di bidang pariwisata dan industri. Menteri Penyatuan Korea Selatan mengatakan pertemuan untuk membicarakan reuni keluarga akan dimediasi oleh Palang

⁷¹“DPRK urges S Korea to accept its proposal to resume dialogue”, <http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/7254214.html>, diakses tanggal 5 Desember 2012.

Merah, setelah pertemuan militer kedua negara berakhir. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Korea Utara tetap menolak tuduhan keterlibatan Pyongyang dalam peristiwa tenggelamnya kapal perang Korea Selatan pada Maret 2010.⁷² Dalam kasus ini, baik Korea Utara maupun Korea Selatan menggunakan strategi *concession making*.

Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 9 Mei 2011, Korea Utara balas menolak usulan dari pihak Korea Selatan untuk melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan syarat Korea Utara mau melakukan denuklirisasi. Keputusan tersebut disampaikan oleh presiden Korea Selatan, Lee Myung Bak dalam sebuah konferensi pers di Berlin setelah bertemu dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel. Lee Myung Bak memilih negara Jerman karena dianggap sebagai simbol reunifikasi yang diharapkan dapat menyadarkan pihak Korea Utara bahwa reunifikasi bukan hal yang buruk bahkan menguntungkan. Dalam pernyataannya, Presiden Korea Selatan secara jelas membuat prasyarat bahwa Korea Utara harus minta maaf atas dua provokasi militer terhadap Korea Selatan tahun lalu yakni tenggelamnya kapal perang Cheonan dan serangan artileri di pulau Yeonpyeong di Laut Kuning. Namun, Korea Utara menolak usulan tersebut dan mengecam permintaan Lee Myung Bak tentang minta maaf Korea Utara atas kasus tenggelamnya kapal Cheonan dan serangan terhadap pulau Yeonpyeong sebagai skema jahat untuk memperburuk suasana dialog dengan "ungkapan provokatif."

⁷² "Korea Selatan dan Utara bertemu",
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/02/110209_koreatalks.shtml, diakses tanggal 5 Desember 2012

Pihak Korea Utara juga mengklaim bahwa permintaan untuk denuklirisasi Korea Utara adalah persekongkolan taktis untuk menyerang Korea Utara. Tetapi kebanyakan ahli sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Lee Myung Bak adalah usulan Seoul resmi pertama untuk mengundang pemimpin Korea Utara. Berdasarkan pemaparan di atas, Korea Selatan mencoba menggunakan strategi *contending*, sedangkan Korea Utara memilih menggunakan strategi *inaction*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik di Semenanjung Korea cukup rumit, yang mana bukan saja mengenai provokasi – provokasi yang dilakukan kedua belah pihak, tetapi juga mengenai isu nuklir yang selalu hangat. Korea Utara sudah lama dikenal sangat ambisius mengembangkan senjata nuklir walaupun telah banyak ditentang berbagai Negara. Bahkan Negara Negara yang tergabung dalam perundingan 6 pihak (China, Korea Utara, Korea Selatan, AS, Jepang, dan Rusia) telah beberapa kali melakukan pendekatan dengan pihak Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya. Selama ini, Korea Utara selalu menolak bahkan tidak mau lagi mengikuti pertemuan 6 pihak karena merasa disudutkan dan menegaskan bahwa program nuklirnya demi keamanan nasional negaranya sendiri. Pada tahun 2009, Korea Utara memakai strategi *withdrawal* dengan keluar dari proses negosiasi 6 pihak.

Pertemuan langka antara utusan nuklir Korea Selatan dan Utara terjadi di Bali tanggal 22 Juli 2011. Momen tersebut membuka harapan baru dalam upaya enam negara untuk menghentikan program nuklir oleh Pyongyang. Pertemuan antara

perwakilan Korea Selatan, Wi Sung-Lac, dan Ri Yong-Ho, Korea Utara, itu merupakan yang pertama antara kedua negara terkait isu nuklir, di luar format negosiasi enam negara. Wi berbicara dengan nada optimistis setelah keluar dari pertemuan selama dua jam di resor bintang lima, Nusa Dua, Bali. Ri juga menunjukkan sikap positif dengan menyatakan bahwa kedua negara setuju untuk segera memulai kembali negosiasi enam negara. Pertemuan keduanya digambarkan berlangsung dengan hangat. Dalam negosiasi tersebut, Korea Selatan menerapkan strategi *contending* untuk membujuk Korea Utara memulai lagi perundingan 6 pihak.

Selanjutnya, pada tanggal 21 September 2011, negara-negara yang terlibat pertemuan nuklir segi-6 telah mengadakan serangkaian dialog untuk menemukan terobosan atas masalah Semenanjung Korea. Kepala juru runding nuklir dari kedua Korea bertemu untuk pembicaraan denuklirisasi kedua mereka di Beijing, dua bulan setelah pertemuan pertama di Bali, Indonesia pada bulan Juli 2011. Dalam pertemuan antar-Korea saat itu, delegasi dari kedua belah pihak mengadakan dua sesi perundingan pada pagi dan sore hari. Tetapi tiga jam negosiasi tidak menghasilkan kesimpulan nyata, karena para juru runding serempak menggunakan strategi *contending* sehingga gagal untuk mempersempit silang pandangan mereka.

Setelah akhir tahun 2011, tidak pernah ada lagi perundingan yang langsung mempertemukan kedua belah pihak. Masing – masing Negara baik Korea Utara maupun Korea Selatan justru sibuk menggalang kekuatan masing masing dengan

sekutu mereka. Korea Selatan semakin mempererat hubungan dengan Amerika Serikat, sedangkan Korea Utara sibuk mengukuhkan diri dan mempererat hubungan dengan China.

B. Strategi Korea Selatan dalam memperjuangkan kepentingannya.

Dalam konflik Semenanjung Korea pertentangan kepentingan diantara pihak pihak yang bertikai sangat kuat. Masing – masing pihak tidak mau melepaskan tuntutan atau bahkan sekedar meringankan tuntutan. Berbagai negosiasi yang telah berjalan juga gagal karena diantara pihak yang bertikai tidak mau duduk sejajar untuk menemukan solusi atas masalah yang ada. Mereka justru duduk berseberangan untuk berusaha memenangkan tuntutan masing – masing. Dari pihak Korea Selatan, pemerintahan Lee Myung Bak tetap mau bernegosiasi walaupun terkesan keras. Akan tetapi, Negara gingseng ini juga tidak mentolerir segala bentuk kompensasi terhadap Korea Utara. Mereka selalu konsisten dengan apa yang ingin dicapai dalam konflik Semenanjung Korea. Korea Selatan lebih menekankan pada upaya denuklirisasi, penghentian provokasi serta krisis kemanusiaan. Pada suatu kesempatan di tahun 2011, presiden Korea Selatan mengungkapkan bahwa Korea Selatan terbuka untuk mengadakan pertemuan puncak dengan Korea Utara, asalkan ada jaminan bahwa KTT antar-Korea akan membawa perdamaian bagi Semenanjung Korea. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa Korea Selatan sering sekali menggunakan strategi *contending*.

Mengenai upaya denuklirisasi, pihak Korea Selatan benar benar tidak mau meringankan tuntutan dan terus berusaha supaya penutupan program nuklir Korea Utara segera tercapai. Strategi *contending* terus dilakukan karena Korea Selatan menganggap isu nuklir merupakan hal yang tidak bisa ditolerir. Program nuklir Korea Utara cukup menjadi ancaman keamanan bagi Korea Selatan. Pemerintahan Lee Myung Bak beberapa kali meradang menyaksikan ketekatan Korea Utara untuk tetap meluncurkan program nuklirnya walaupun telah ditentang banyak Negara. Pemerintah Korea Selatan juga mengingatkan Korea Utara untuk tidak melakukan uji coba senjata nuklir. Ditegaskan bahwa langkah itu hanya akan membuat negeri komunis itu semakin terisolasi dari komunitas internasional. Senjata nuklir dipandang tidak akan menjamin keamanan Korea Utara namun justru memperparah isolasi politik dan ekonominya. Seoul menghimbau agar Korea Utara kembali melanjutkan perundingan enam negara guna menyelesaikan krisis program nuklir negara tersebut.

Perundingan enam Negara atau six party talk merupakan sebuah forum untuk membahas krisis nuklir Korea Utara yang mana Korea Selatan juga terlibat didalamnya. Forum ini telah beberapa kali dilakukan dan terhenti pada tahun 2008 dikarenakan Korea Utara menarik diri dari perundingan. Dalam perundingan terakhir tersebut 6 peserta setuju tindakan rinci untuk melumpuhkan fasilitas nuklir Korea Utara dan menyelesaikan pemasokan bantuan energi ke Korea Utara, maupun membangun mekanisme untuk memverifikasi laporan nuklir Korea Utara. Sistem verifikasi itu akan termasuk kunjungan tim ahli nuklir ke lokasi,

pemeriksaan dokumen dan wawancara dengan teknisi Korea Utara. Mereka juga setuju untuk membangun sistem monitoring yang terdiri atas ketua juru runding nuklir dari 6 negara. Lebih jauh lagi, para peserta setuju untuk membuka pertemuan tingkat menteri dan forum multilateral untuk membahas keamanan di kawasan Asia Timur Laut dalam waktu yang tepat. Dalam hari terakhir pertemuan selama 3 hari, Wu Dawei , ketua juru runding negara tuan rumah , China, mengumumkan 'komunike untuk pers' yang terdiri atas Kata Pengantar , dan 6 hal kesepakatan.⁷³

Namun beberapa saat setelah perundingan six party talk tepatnya pada bulan agustus 2008, Korea Utara justru mengumumkan tindakan penghentian proses pelumpuhan fasilitas nuklirnya dan juga mempertimbangkan upaya pemulihan kembali fasilitas tersebut. Tindakan tersebut dianggap tidak ada gunanya dan hanya akan menyebabkan kemunduran terhadap berbagai upaya denuklirisasi yang sedang berjalan. Segenap upaya menuju Semenanjung Korea yang bebas nuklir dalam kerangka perundingan segi enam selama ini, ditujukan untuk membantu Korea Utara menjadi anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab. Sehingga, kerugian terbesar akibat kemunduran perundingan isu nuklir akan ditanggung oleh Korea Utara sendiri. Oleh karena itu, Korea Selatan dan negara-negara peserta perundingan segi enam lainnya secara bulat mendesak Korea Utara untuk memulai kembali proses pelumpuhan fasilitas

⁷³ "Pertemuan Ketua Juru Runding Sesi Ke dua Pertemuan Segi Enam tahap ke enam", http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/world_011.htm, diakses tanggal 20 September 2012.

nuklirnya. Hal tersebut menandakan para pihak yang terlibat menggunakan strategi *contending* untuk memaksa Korea Utara kembali ke meja perundingan.

Sebagai peninjau, Intisari kesepakatan penyelesaian isu nuklir Korea Utara yang tercapai di bulan September 2005 dan Oktober 2007 ialah pembuangan program nuklir Korea Utara serta pemberian bantuan ekonomi dan dukungan politik sebagai imbalannya. Dalam kerangka kesepakatan itu, deklarasi nuklir menjadi salah satu tindakan yang harus dilakukan oleh Pyongyang dan deklarasi tersebut bukan sekedar 'pemberitahuan' semata, namun harus diikuti oleh tindakan verifikasi atau pembuktian. Kelima negara peserta perundingan segi enam lainnya, terutama pihak Korea Selatan, sangat sepakat tentang hal tersebut. Juru bicara Departemen Luar Negeri Korea Selatan, Mun Tae-young, menyampaikan kekecewaan atas tindakan Korea Utara karena terjadi di saat saat penting, yakni ketika keenam negara seharusnya sudah berhasil menyelesaikan perundingan tahap kedua proses denuklirisasi. Sebelumnya keenam negara telah sepakat untuk menyusun tatacara verifikasi dan menyerahkan pembuatan rencananya secara rinci pada tingkat kelompok kerja. Oleh karena itu, pihak Seoul mendesak Pyongyang agar pembicaraan mengenai hal tersebut dilanjutkan dan proses pelumpuhan fasilitas nuklir dimulai lagi. Jika Korea Utara ingin masuk kembali dalam tatanan masyarakat internasional, maka negara itu harus bertindak

hati-hati menurut standar internasional, bukan bertindak menurut logikanya sendiri.⁷⁴

Tidak hanya melalui pembicaraan six party talk, Korea Selatan bahkan gencar menggalang dukungan untuk denuklirisasi Korea Utara melalui hubungan bilateral dengan berbagai Negara. Hal ini dilakukan untuk semakin mempertegas komitmen Korea Selatan dalam mewujudkan Semenanjung Korea yang damai. Seperti pada awal januari 2011, Pihak Korea Selatan bertemu dengan Pihak Jepang dan sepakat bahwa Korea Utara harus mengambil langkah nyata untuk menunjukkan komitmen penghapusan senjata nuklirnya. Dalam satu pertemuan di Seoul, Menteri Luar Negeri Jepang Seiji Maehara dan Menteri Luar Negeri Korsel Kim Sung-Hwan sepakat bahwa Korut harus terlibat dalam pembicaraan produktif dengan Korsel sebelum pembicaraan lain di antara enam pihak berlangsung. Hal ini dilakukan supaya pembicaraan enam pihak dapat berlangsung kondusif dan produktif. Kedua Negara sepakat bahwa isu nuklir Korea Utara sangat meresahkan dan menjadi ancaman bagi keamanan nasional Negara masing masing dan juga bagi perdamaian di Asia Timur.⁷⁵

Tidak hanya dengan Jepang, Korea Selatan juga meminta dukungan China yang notabene merupakan sekutu terdekat Korea Utara. Pada akhir November

⁷⁴ "Tindakan penghentian pelumpuhan fasilitas nuklir Korea Utara", http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_issue_detail.htm?No=13563, diakses tanggal 30 Desember 2012.

⁷⁵ "Korut Mesti Punya Langkah Nyata", <http://internasional.kompas.com/read/2011/01/15/19171540/Korut.Mesti.Punya.Langkah.Nyata>, diakses tanggal 29 Desember 2012.

2012, Utusan penting nuklir Korea Selatan berangkat ke China untuk membahas situasi terakhir di Korea Utara, di mana citra satelit menunjukkan bahwa Korut bisa meluncurkan peluru kendali jarak jauh dalam beberapa pekan selajutnya. Lim Sung-nam, kepala perunding Seoul untuk perundingan enam negara yang bertujuan mengakhiri ambisi nuklir Korea Utara, mengatakan bahwa dirinya bertukar pandangan mengenai situasi terakhir di Semenanjung Korea dengan para pejabat China. Lim dan para pejabat China juga bertukar pandangan mengenai arah kebijakan Korea Utara di bawah kepemimpinan baru China dan mendiskusikan kerja sama masa depan atas masalah di Semenanjung Korea.

Tidak hanya dengan Jepang dan China, Korea Selatan tentu saja terus meyakinkan Amerika Serikat bahwa program denuklirisasi merupakan upaya yang tepat untuk menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea. Pada bulan maret 2012, tepatnya di Washington, Menteri luar negeri Korea Selatan dan menteri luar negeri Amerika Serikat sepakat bahwa upaya yang telah dijanjikan Korea Utara untuk denuklirisasi dan perbaikan hubungan antar- Korea sangat penting untuk membuka kembali pertemuan segi -6. Lebih khusus lagi, kedua pihak meminta Korea Utara untuk aktif berdialog dan menegaskan bahwa perbaikan hubungan antara Korea Utara dan Amerika Serikat juga tidak bisa tercapai tanpa perbaikan hubungan antar-Korea.⁷⁶

⁷⁶ "Menlu Koresel dan AS prioritaskan upaya Korut untuk denuklirisasi dan perbaikan hubungan", http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_Po_detail.htm?No=26170, diakses tanggal 29 Desember 2012.

Tuntutan kedua setelah upaya denuklirisasi adalah mengenai tindakan provokasi. Dalam hal ini Korea Selatan juga menggunakan strategi *contending*. Pemerintah Korea Selatan menuntut agar Korea Utara mau menghentikan segala bentuk provokasi militernya yang sangat mengganggu dan merugikan pihak Korea Selatan. Korea Utara beberapa kali terbukti melakukan provokasi militer yang bahkan menelan banyak korban jiwa. Peristiwa krusial yang cukup mengagetkan adalah kasus penenggelaman kapal cheonan dan penyerangan pulau yeonpyeon yang semuanya terjadi ditahun 2010. Setelah kasus penyerangan pulau yeonpyeon, Korea Selatan menegaskan bahwa Korea Utara harus bertanggungjawab atas segala provokasi selanjutnya. Pemerintahan Lee Myung Bak berpendapat bahwa menyerang sipil dan militer adalah sebuah kejahatan yang tidak manusiawi yang dilarang keras dalam waktu perang. Korea Selatan merasa bahwa negaranya tidak boleh lagi mentolerir segala bentuk provokasi dari Korea Utara. Warga Korea Selatan yang marah dengan perlakuan negara tetangganya ini banyak yang turun ke jalan. Sekitar 500 mantan tentara dan mantan polisi membakar bendera Korea Utara dan patung pemimpin Korea Utara Kim Jong-il dalam sebuah aksi demo di Seoul. Negosiator nuklir Korea Selatan, Lim Sung-nam mengatakan, jika Korea Utara berhenti memprovokasi, maka akan ada jalan lain untuk melakukan diplomasi.

Tuntutan ke tiga adalah mengenai adanya krisis kemanusiaan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Korea Utara mengembangkan senjata nuklir dan selalu merasa percaya diri jika negaranya tidak membutuhkan bantuan pihak lain,

padahal didalam negeri rakyat Korea Utara hidup miskin dan diambang ancaman kematian akibat kelaparan yang begitu kronis. Pada bulan juni 2010, sebuah survey ekonomi yang dilakukan Organisasi Kerjasama Ekonomi Pembangunan (OECD) untuk Korea Selatan memperlihatkan bahwa ada jurang kesenjangan yang cukup lebar diantara kedua Korea. OECD melansir, meski populasi Korea Utara untuk tahun 2008 tercatat 23,3 juta jiwa atau sekitar 48 persen dari populasi penduduk Korea Selatan, produk domestic bruto (GDP) nya berada pada angka USD 24,7 miliar. Jumlah tersebut hanya sekitar 2,7 persen dari GDP Korea Selatan. Data tersebut berpengaruh kepada pendapatan perkapita rakyat Korea Utara. OECD menyebut, GDP per kapita rakyat Korea Utara sekitar USD 1.060 per tahun atau hanya 5,6, persen GDP per kapita Korea Selatan. Selain itu, volume total perdagangan Korea Utara diperkirakan sekitar USD 3,8 miliar dolar atau hanya 0,4 persen dari volume perdagangan Korea Selatan.⁷⁷ Data tersebut sudah dapat dijadikan patokan betapa miskin dan terlantarnya rakyat Korea Utara. Saat ini, rakyat Korea Utara hanya berusaha sekedar dapat hidup dari hari ke hari tanpa ada harapan mengenai hal lain. Korea Selatan berharap pemerintah Korea Utara mau lebih memperhatikan kondisi rakyatnya dari pada mempertahankan keegoisan untuk terus unjuk kemampuan kepada dunia internasional.

Krisis pangan ini semakin parah pada petengahan 2012 ketika Korea Utara terlanda beberapa bencana alam. Banjir selama sepekan yang disebabkan oleh angin topan dan hujan terus-menerus telah menyebabkan 88 orang tewas dan

⁷⁷ "Dua Bersaudara Beda Nasib", *Jawa Pos*, 27 juni 2010

ribuan hektar lading hancur. Sebanyak 134 orang lain mengalami cedera, ribuan rumah hanyut atau rusak diterjang banjir serta lebih dari 63.000 orang kehilangan tempat tinggal. Lebih dari 30.000 hektar ladang yang telah ditanami diberitakan terkubur lumpur, terendam, atau tersapu banjir. Hal ini menjadi pukulan baru bagi Korea Utara yang terus-menerus dilanda krisis kekurangan pangan. Hal ini diperparah dengan kondisi tanah berbatu dan praktik bertanam yang masih tradisional, Korea Utara menghadapi kesulitan besar untuk menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduk yang berjumlah sekitar 24 juta jiwa. Tanpa perlu dilanda banjir pun, Korea Utara sudah mengalami krisis pangan. Sistem distribusi pangan yang tidak berfungsi, inflasi yang melambung tinggi, dan sanksi internasional akibat program pengembangan nuklir dan rudal Korea Utara menjadi penyebab utama. Perwakilan badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengunjungi negeri itu pada November 2011 memperkirakan, sekitar tiga juta penduduk Korea Utara membutuhkan bantuan pangan pada tahun tersebut.

Krisis pangan ini sebenarnya mendapat jalan keluar ketika Pemerintah Korea Utara pada 29 Februari lalu bersepakat dengan Amerika Serikat (AS) yang akan memberikan bantuan pangan sebanyak 240.000 ton. Namun, Amerika Serikat menunda bantuan itu setelah Korea Utara ngotot menggelar uji coba roket pada April lalu. Uji coba itu gagal dan Korea Utara kemudian membatalkan kesepakatan dengan Amerika Serikat.⁷⁸ Melihat kenyataan yang begitu parah

⁷⁸ "Krisis Pangan Korut Memburuk",
<http://internasional.kompas.com/read/2012/07/30/02322487/Krisis.Pangan.Korut.Memburuk>,
diakses tanggal 29 Desember 2012.

tersebut, pihak Korea Selatan benar benar mendesak pemerintah Korea Utara untuk lebih manusiawi dan memperhatikan kondisi rakyatnya. Tidak dapat dipungkiri walaupun kedua Negara saling adu urat syaraf, namun sesekali pihak Korea Selatan mengirimkan bantuan pangan bagi saudara sekaligus musuhnya tersebut.

Selain krisis pangan juga ada isu krisis kemanusiaan yang lain yaitu mengenai kerja paksa. Tidak semua orang bisa masuk ke Korea Utara, kecuali yang benar benar diizinkan. Jika ketahuan meeros, maka akan dikenakan kerja paksa. Begitu juga sebaliknya, tidak semua orang bisa keluar dari Korea Utara dengan selamat. Banyak dari para pembelot yang ingin menyeberang ke Korea Selatan justru tertangkap otoritas China untuk kemudian dideportasi. Lee Myung Bak bahkan mengatakan bahwa isu pelanggaran HAM Korea Utara lebih mendesak untuk ditangani ketimbang soal program nuklir atau rudalnya. Hal tersebut dicetuskan Lee ketika bertemu sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Termasuk dalam rombongan tersebut adalah anggota DPR Amerika Serikat, Ileana Ros-Lehtinen, yang menjadi ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika Serikat.⁷⁹ Dalam hal ini, pihak Korea Selatan menggunakan strategi *contending* dengan menegaskan komitmen Korea Selatan atas penegakan Hak Asasi manusia.

⁷⁹ "Korsel: Isu HAM Korut Lebih Mendesak Ketimbang Soal Nuklirnya", <http://news.detik.com/read/2012/05/23/151150/1922900/1148/korsel-isu-ham-korut-lebih-mendesak-ketimbang-soal-nuklirnya?nd771104bcj>, diakses tanggal 28 januari 2013

C. Strategi Korea Utara dalam memperjuangkan kepentingannya

Selain Korea Selatan, Korea Utara juga memiliki tuntutan yang sangat gigih dipertahankan. Pihak Korea Utara cukup dikenal sebagai Negara yang keras dan kukuh atas apa yang ingin dicapai walaupun mendapat tentangan dari banyak pihak. Dalam konflik Semenanjung Korea, terdapat beberapa kepentingan yang dipegang teguh sehingga membuat konflik dua Korea tidak terselesaikan. Kepentingan pertama yaitu mempertahankan keberlangsungan rezim Korea Utara sendiri, yang kedua adalah motif ekonomi, dan yang ketiga adalah untuk mengangkat citra Korea Utara dimata dunia.

Mengenai kepentingan pertama yaitu mempertahankan keberlangsungan rezim, hal ini dipandang rasional karena sejatinya kedua Korea masih resmi berperang. Sebagai Negara yang masih dalam kondisi perang, sangat ideal apabila Korea Utara berusaha terus meningkatkan kemampuan militer dan nuklirnya demi menjaga Negara Korea Utara tetap kokoh berdiri. Walaupun banyak ditentang berbagai Negara termasuk dari pihak Korea Selatan, Korea Utara menganggap apa yang dilakukannya adalah demi menjaga keamanan nasionalnya. Oleh karena itu sangat wajar ketika berbagai perundingan berusaha dilakukan untuk membahas pelumpuhan fasilitas nuklir, Korea Utara terus menggunakan strategi *contending* dengan penggunaan ancaman dan keteguhan pada komitmen. Korea Utara dengan tegas menolak untuk mundur dalam mengembangkan nuklir. Bahkan dalam sebuah pemberitaan di media massa, Korea Utara bersumpah untuk terus melakukan modernisasi senjata nuklir. Sebenarnya Korea Utara sempat

melunak ketika perundingan enam pihak pada tahun 2006, akan tetapi kemudian kembali mengeras dan bahkan menyatakan diri keluar dari perundingan enam pihak pada tahun 2009.

Hal ini sedikit banyak dikarenakan pergantian rezim di Korea Selatan yang selanjutnya dinilai menerapkan kebijakan garis keras terhadap Korea Utara. Selain itu, kekukuhan Korea Utara dalam mengembangkan senjata nuklir juga tidak terlepas dari sikap bermusuhan Amerika Serikat. Dalam memorandum Kementerian Luar Negeri Korea Utara tahun 2012, disampaikan bahwa negara ini tengah mengembangkan persenjataan nuklir sebagai upaya pertahanan diri dari tuduhan Amerika Serikat. Diketahui bahwa selama ini Amerika Serikat tiada hentinya menyerukan bahaya nuklir Korea Utara terhadap negara-negara Barat dan aliansinya. Memorandum yang dipublikasikan oleh kantor berita nasional Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), tersebut menyatakan bahwa Korea Utara tidak memiliki pilihan lain selain memperpanjang kepemilikan senjata nuklir 'hingga Amerika Serikat membuat keputusan yang tepat'.⁸⁰

Kepentingan kedua yaitu dalam bidang ekonomi. Seperti diketahui Korea Utara merupakan Negara miskin dengan kemampuan ekonomi yang sangat lemah. Banyak pakar hubungan internasional menganggap kegigihan Korea Utara dalam mempertahankan program nuklirnya tidak lepas dari tuntutan Negara tersebut supaya mendapat bantuan ekonomi bagi rakyatnya yang mengalami

⁸⁰ "Korut Bersumpah Terus Kembangkan Senjata Nuklir Hingga AS Melunak", <http://news.detik.com/read/2012/08/31/182842/2004787/1148/korut-bersumpah-terus-kembangkan-senjata-nuklir-hingga-as-melunak>, diakses tanggal 5 Januari 2013.

kelaparan kronis. Moncong nuklir dapat mengarah kapan saja ke Negara mana saja ketika kemauan Korea Utara tidak terpenuhi. Sebelum mengembangkan nuklir, perekonomian Korea Utara memang telah melemah. Sepanjang tahun 1990-an, Korea Utara mengalami berbagai macam kesulitan dalam menyeimbangkan perekonomian negaranya, dan mengakibatkan masuk daftar kategori negara miskin. Adapun kemiskinan itu ditopang oleh beberapa faktor seperti, semakin menurunnya perekonomian negara dengan hilangnya strategi perdagangan dengan negara kesatuan Soviet.

Selain itu, faktor yang mendorong Korea Utara menjadi negara miskin adalah ketidakmampuan Korea Utara dalam mengimpor barang-barang yang diperlukan untuk menampung industri negaranya, sehingga menyebabkan kemelesetan ekonomi. Keterpurukan tersebut disusul dengan adanya pendidikan dan kesehatan yang rendah serta kurang memadai, juga munculnya bencana banjir yang kemudian diikuti kemarau dasyat selama beberapa tahun. Fenomena tersebut bermula sejak tahun 1997, dan menjadi salah satu faktor pendukung melemahnya perekonomian Korea Utara .

Rapuhnya perekonomian Korea Utara juga akibat dari lamanya proses penerimaan bantuan dari Organisasi Internasional (PBB), serta hutang luar negerinya yang tinggi, juga GNP (Gross National Product) yang semakin menurun. Faktor kemiskinan Korea Utara juga didukung atas kegagalan Pyongyang dalam melakukan uji coba senjata kelimanya, yakni Taepodong II. Bersamaan dengan krisis nuklir, Pyongyang akhirnya mendapatkan tekanan dari

negara-negara internasional terutama terkait pengembangan nuklirnya di wilayah Yongbyon. Saat ini Korea Utara telah berhasil mengembangkan beberapa macam senjata nuklir yang disinyalir telah mampu menandingi kecanggihan teknologi Amerika Serikat. Keberadaan senjata-senjata nuklir tersebut merupakan upaya keras dari pemerintah Korea Utara untuk membuktikan kepada rakyat dan dunia internasional bahwa sejalan dengan perekonomian negaranya yang lemah, Korea Utara ternyata masih mampu menciptakan persenjataan nuklirnya.⁸¹

Beberapa bukti yang mengindikasikan kepemilikan senjata nuklir adalah untuk mendapatkan bantuan ekonomi tercermin tahun 2010 dan 2011, ketika Korea Utara meminta bantuan ke Korea Selatan dan China. Hal itu menandakan Korea Utara menggunakan nuklir sebagai ancaman. Pada tahun 2010, Korea Utara mengirimkan permintaan bantuan beras kepada Korea Selatan akibat bencana banjir yang dialaminya. Permohonan itu datang setelah Seoul menawarkan akan memberikan bantuan darurat termasuk pangan, bahan-bahan bantuan lain senilai 10 miliar won (8,5 juta dolar AS), sebagai paket bantuan pertama. Akan tetapi tawaran itu tidak termasuk beras atau peralatan pembangunan, seperti yang diharapkan Korea Utara. Korea Selatan enggan

⁸¹ Andi Purwono dan Ahmad Saifuddin. "Peran Nuklir Korea Utara Sebagai Instrumen Diplomasi Politik Internasional" dalam jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional Unwahas Vol. 7, No. 2, Juni 2010

memberikan beras kepada Korea Utara karena pihaknya khawatir bantuan itu tidak mencapai pada rakyat yang membutuhkan.⁸²

Sedangkan pada tahun 2011, Pemimpin Korea Utara Kim Jong Il dilaporkan tiba di kota Changchun, China, dikarenakan sangat membutuhkan bantuan ekonomi. Para ahli mengatakan kunjungan itu mencerminkan bahwa Korea Utara sangat membutuhkan bantuan dari pendukung utamanya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi dan kekurangan pangan di tengah sanksi-sanksi internasional menyangkut ambisi nuklirnya. Sebelumnya pada tahun 2009, Amerika Serikat dan Korea Selatan sepakat untuk menawarkan bantuan kepada Korea Utara. Namun, bantuan itu baru dibicarakan bila Korea Utara menyatakan bersedia menanggalkan program senjata nuklirnya. Pendekatan itu disebut sebagai Penawaran Besar (Grand Bargain). Presiden Lee Myung Bak mengatakan bahwa paket bantuan yang ditawarkan kedua negara mirip dengan usulan paket kebijakan politik dan insentif ekonomi yang mereka usulkan sebelumnya. Tujuannya agar Korea Utara tidak meneruskan program nuklirnya.⁸³ Akan tetapi tetap saja Korea Utara tidak mau merelakan penutupan fasilitas nuklirnya.

Kepentingan ketiga adalah mengangkat citra Korea Utara dimata dunia internasional. Dengan adanya konflik di semenanjung Korea, sudah pasti akan memunculkan banyak pemberitaan pemberitaan mengenai Korea Utara dan segala

⁸² "Korea Utara Minta Bantuan Beras ke Korea Selatan", <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/10/09/07/133952-korea-utara-minta-bantuan-beras-ke-korea-selatan>, diakses tanggal 4 Januari 2013.

⁸³ "AS dan Korsel Beri "Tawaran Besar" ke Korut", http://log.viva.co.id/news/read/107131-as_dan_korsel_beri_tawaran_besar_ke_korut, diakses tanggal 6 Januari 2013

perkembangannya di berbagai media massa di dunia. Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk mengenalkan Korea Utara pada dunia internasional. Dalam hal ini, Korea Utara menggunakan strategi *contending* dengan melontarkan berbagai ancaman dan argumen persuasif lewat media - media internasional. Dengan terus mengembangkan nuklir dan memperkuat pertahanan militer, Korea Utara akan dipandang sebagai Negara yang kuat dan tangguh. Bahkan berbagai provokasi militer dilakukan guna memperlihatkan kemampuan alutsista militernya kepada musuhnya, Korea Selatan dan juga dunia.